TAJUK RENCANA

Kawal Kasus Sambo Sampai Pengadilan

KASUS pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J memasuki babak baru menyusul penetapan Putri Candrawathi, istri Irjen Pol Ferdy Sambo, sebagai tersangka pembunuhan berencana. Putri disangka dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP. Ancamannya sangat serius yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Dibanding pasal yang disangkakan penyidik kepada Ferdy Sambo, tidak ada bedanya, sehingga suami-istri ini terancam hukuman mati. Setidaknya publik telah mendapat jawaban seputar apa yang bakal ditanggung istri Ferdy Sambo. Sebab, bila dirunut kronologinya, Putri-lah yang mengadukan Brigadir J ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual. Namun setelah dilakukan penyelidikan, tak ditemukan indikasi tindak pidana seperti yang dilaporkan Putri.

Artinya, diduga kuat Putri telah berbohong dengan membuat laporan palsu. Padahal, dalam KUHP sangat jelas siapapun yang mengadukan laporan palsu tentang terjadinya tindak pidana, diancam hukuman satu tahun empat bulan penjara. Dengan begitu, sangkaan kepada Putri mestinya ditambah dengan Pasal 221 KUHP tentang laporan palsu.

Penetapan Putri sebagai tersangka pembunuhan berencana juga sangat kuat karena didasarkan pada alat bukti yang cukup, baik berdasar keterangan saksi maupun alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV di tempat kejadian. Rekaman CCTV yang disita penyidik menunjukkan dengan jelas peran Putri dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Bahkan, dalam perkembangannya, polisi telah membidik enam perwira Polri yang diduga telah menghalangi penyidikan (obstruction of justice) di TKP Rumah Dinas Kadiv Propam Duren Tiga Jakarta Selatan. Mereka berusaha merusak barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang menjadi petunjuk kuat terjadinya pembunan berencana. Diduga masih ada lagi perwira yang terlibat dan bakal dijerat dengan UU ITE.

Hemat kita, drama pembunuhan Brigadir J tak berhenti sampai pada penetapan tersangka Putri Candrawathi. Sebab, meski Polri telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana, diduga yang bersangkutan masih punya pengaruh di institusi Polri. Artinya, masih terbuka kemungkinan terjadinya rekayasa dalam penanganan kasus Sambo.

Apalagi, bila benar isu Sambo sebagai pengendali jaringan mafia perjudian konsorsium 303, hampir dipastikan koleganya akan membela mati-matian. Di sinilah sebenarnya butuh transparansi proses hukum terhadap Ferdy Sambo. Publik juga berhak tahu apa saja yang dilakukan Ferdy Sambo di Mako Brimob. Apakah yang bersangkutan benar-benar ditahan ? Atau hanya berpindah ruang dan masih diberi keleluasaan untuk berkomunikasi dengan siapa saja.

Kita teringat dengan pernyataan Menkopolhukam Moh Mahfud MD baru-baru ini tentang mafia hukum yang bisa merambah ke semua lini dan melibatkan oknum penegak hukum, yang meliputi kepolisian, pengacara, jaksa, hingga hakim. Karenanya, kita perlu mengingatkan, dengan penetapan tersangka Ferdy Sambo dan istrinya, serta dua personel polisi dan satu asisten rumah tangga, bukan berarti drama telah usai.

Justru inilah saat paling krusial, yakni bagaimana agar hukum ditegakkan secara benar (on the track) dan dipastikan tidak ada yang merekayasa. Peran masyarakat, warganet, sangat signifikan untuk mengawal proses hukum terhadap Ferdy Sambo Cs, jangan sampai masuk angin, baik polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. ❑

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Masih Diperlukan Pendidikan Politik

BANYAK yang mengatakan, anak-anak generasi milenial kurang peduli persoalan politik. Mereka bahkan tampak tidak tertarik pada politik bahkan tidak tertarik politik termasuk dengan pemilu. Benar tidaknya, *wallahu-'alam.* Hanya kalau melihat gaya hidup mereka yang bekerja dan bekerja dan kemudian duit yang dikumpulkan untuk wisata, bisa jadi itu benar.

Padahal dalam Pemilu 2024 ini muncul partai-partai baru. Yang mungkin bagi anak generasi milenial tidak terlalu dipahami *track record*-nya. Sementara partai baru dan partai gurem kini mendekati tokoh baik selebriti, ulama, tokoh muda bahkan youtuber atau bintang lain yang diharap akan mendulang suara, lolos ambang batas.

Fakta yang sedikit mengkhawatirkan, jika anak-anak milenial ini tidak mendapatkan pendidikan politik. Artinya, masih diperlukan pendidikan politik yang dilakukan lembaga independen. Sehingga pendidikan itu tidak menjadi *brainstorming* atau indoktrinasi semata. Kampus, tampaknya ditunggu untuk berperan di sini.

Fauzi, *Jl Soekarno Hatta Magelang*

Rencana Kenaikan Harga BBM

MAJU mundur kenaikan harga BBM terjadi karena katanya belum ada kesepakatan para menteri. Wapres juga mengatakan, rencana tersebut masih dalam pembahasan. Namun dibahas atau tidak, tetap akan naik. Bahkan dampaknya bagi rakyat kecil mulai terasa ketika harga mulai merambat naik. .

Kini, kebelumpastian itu juga terasa. Meski tidak mengatakan pasti, pedagang sayur keliling juga sudah ancang-ancang dan mengingatkan, agar belanja sekarang sebelum harga naik. Ini terasa mengganggu. Bagi rakyat kecil seperti kami, kenaikan harga akan berdampak luar biasa, di tengah kehidupan yang kian sulit.

Diva, *Jl Imogiri Timur*

Menagih Kontribusi Perguruan Tinggi

Bagong Suyanto

ISU yang menjadi tantangan Perguruan Tinggi (PT) saat ini di tanah air adalah arah dan tantangan perkembangan universitas menuju *word class university*. Di tahun 2002, ada lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang masuk dalam ranking 500 dunia (*word class university*). Jika pada tahun 2021 UGM ada di ranking 254 dunia, di tahun 2022 UGM naik rankingnya menjadi 231. ITB dari ranking 303 naik menjadi 235. UI dari 290 menjadi 248. Sedangkan Universitas Airlangga dari ranking 465 dunia menjadi 369. Institut Pertanian Bogor naik dari 511-520 menjadi 449.

Kenaikan ranking beberapa PTN terkemuka di Indonesia ini tentu patut disambut gembira. Masuk dalam jajaran 500 PT terbaik dunia tentu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras agar PTN bisa naik kelas dan masuk ke dalam 500 universitas besar dunia. Namun demikian, lantas apa yang harus dilakukan setelah PTN berhasil masuk ke dalam 500 univeritas terbaik di dunia

Kontribusi

Mengutip apa yang dikatakan Prof Fernando Reimers (2018) dari Harvard University, Menteri Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2014-2019) M Nasir dalam sebuah seminar mengemukakan pertanyaan retorik : apa guna PTN berhasil masuk dalam ranking 500 besar dunia jika tidak ada kontribusi yang bisa diberikan kepada masyarakat? Menurut Fernando Reimers, pertanyaan penting yang harus menjadi acuan untuk menakar kinerja PTN adalah layanan apa dan kongtribusi seperti apa yang bisa diberikan universitas sebagai lembaga pendidikan untuk masyarakat?

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, salah satu acuan yang bisa dipakai untuk menakar kinerja PTN di Indonesia, menurut Mohamad Nasir adalah sejauhmana PTN telah berkontribusi pada program SDGís? Banyak penelitian dan pengabdian telah dilakukan PTN untuk mendukung proses pembelajaran di kampus. Tetapi, persoalannya kemudian adalah apakah PTN sudah berkontribusi dalam penanganan kemiskinan *(no poverty)* dan stunting (*zero hunger*)? Sudahkan , ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan jender, penanganan masalah kelestarian lingkungan, mengurangi ketidaksetaraan dan lain sebagainya.

KR-JOKO SANTOSO

PTN yang fokus mengejar ranking menjadi universitas terbaik dunia, tetapi lupa berkontribusi secara nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka mereka hanyalah instutusi pendidikan tinggi yang hanya menjadi menara gading semata. Artinya, PTN itu bangga dan bisa menepuk dada dengan prestasinya. Tetapi pada saat mereka lupa melayani kebutuhan masyarakat dan berperan nyata dalam pembangunan, sesungguhnya mereka adalah PTN yang soliter dan asensitif pada lingkungan sosialnya.

Kesejahtaraan

Memastikan agar perkembangan PTN tidak salah arah harus diakui bukanlah hal yang mudah. Dengan program hilirisasi riset, aktivitas pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder memang koridor bagi PTN untuk lebih membumi menjadi lebih terbuka. PTN dapat memberikan kontribusinya membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Masalahnya sekarang adalah sejauhmana dosen dan tenaga kependidikan benar-benar siap untuk berkontribusi kepada masyarakat, terutama ketika persoalan kesejahteraan mereka masih belum memuaskan. Diakui atau tidak, di Indonesia persoalan kesejahteraan dosen hingga kini masih menjadi tantangan tersendiri. Gaji seorang Guru Besar pun masih kalah dengan penghasilan lurah apalagi camat. Apalagi dosen pemula atau dosen yang belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi Dosen.

Berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, niscaya baru akan dapat diwujudkan jika pemerintah telah memberikan jaminan yang pasti terhadap kesejahteraan insan PTN. Bagaimana pendapat anda? ❑

) **Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Bramastia

KEBIJAKAN Dana Abadi Perguruan Tinggi (PT) diluncurkan Kemendikbudristek, Senin (27/6) silam. Dan ditujukan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang kini berjumlah 16 institusi. Dalih utama Dana Abadi PT yang hanya diberikan kepada universitas berstatus PTN BH karena memang mencari PT yang otonom. Secara regulasi, PTN BH memiliki kemampuan mengelola aset finansialnya secara independen, sedangkan yang belum PTN BH masih terganjal regulasi.

Nafas otonomi menjadi tolok ukur Kemendikbudristek menentukan fokus dari Dana Abadi PT, karena sistem pengelolaan diberikan kewenangan dalam aspek Pengelolaan Barang Jasa (PBJ). Bahkan, sampai pada aspek pengadaan barang impor dan tata caranya diserahkan ke aturan internal setiap kampus PTN BH, meskipun ditegaskan sebaiknya menggunakan produk dalam negeri.

Melihat Referensi

Dana Abadi PT adalah kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun dan bunganya disalurkan ke PTN BH yang berhasil menggalang dana masyarakat. Bunga dari dana abadi setiap tahunnya akan disalurkan kepada PTN BH yang bisa dan berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing.

Sesungguhnya PT didorong untuk membuat dana abadi sendiri sebagaimana yang dilakukan universitas berkelas dunia di negara lain. Intinya, bagaimana meningkatkan pendapatan di luar bantuan pemerintah melalui berbagai kontribusi alumni, swasta atau korporasi dan lainnya. Secara vulgar bisa juga disebut dalih pemerintah lepas tangan atas pendanaan PT, tetapi tetap menuntut kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam pandangan penulis, pemerintah ëhanyaí melihat referensi universitas terbaik di dunia, misalnya Hardvard dan Yale, yang reputasinya terbaik serta sukses meraih dana abadi mencapai 10 Miliar US Dollar. Ide tersebut menjadi pijakan untuk direalisasikan di Indonesia. Karena ada PT lain yang berhasil menghimpun besaran dana abadi sangat fantastis, yakni Princeton University di Amerika Serikat atau King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia yang punya dana abadi hingga 20 Miliar US Dollar (National Public Radio, 2009).

Di Indonesia, potensi dana abadi belum dioptimalkan. Sebagai PTN BH yang memiliki hak istimewa yang berupa ragam keluwesan dan cara yang lebih beragam meraih sumber dana PT luar pemerintah, tentu tidak salah. Artinya, bahwa potensi dana abadi sangat besar apabila pengelola perguruan tinggi mengoptimalkan dengan baik.

Kebijakan terbaru ini membuat perguruan tinggi yang berstatus PTN BH harus menghimpun dan mengelola dana abadi yang berasal dari masyarakat. PTN BH harus mulai memasang target dana abadi yang akan dihimpunnya dengan usaha mengajak masyarakat berkontribusi terhadap dana abadi perguruan tinggi. Misalnya, PTN BH kerja sama dengan salah satu lembaga keuangan untuk mengeluarkan produk dana abadi dalam bentuk reksa dana.

Nir-informasi

Sebaliknya, PT yang sudah PTN BH namun nir-informasi cara menghimpun dan menginvestasikan dana abadi. Tentu harus berpikir seribu kali untuk bisa memaksimalkan potensi dana abadi yang dimilikinya. Bisa jadi ada PTN BH yang gagal paham bagaimana cara membentuk lembaga khusus yang mampu mengelola dana abadi serta lebih fokus mengembangkan varian program berbasiskan potensi institusi.

Rakyat harus diperkenalkan mengenai potensi dari kontribusi dana abadi terhadap PTN BH. Kalau perlu, PTN BH juga harus mempelajari bagaimana PT terbaik di dunia mengelola dana abadi dengan tetap melakukan penyesuaian, pertimbangan dan etika yang tidak memberatkan publik. Pascapaham substansi dana abadi, baru kemudian menerapkan kebijakan dana abadi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. ❑

) **Dr Bramastia MPd, pemerhati kebijakan pendidikan, Dosen S2 Pendidikan Sains FKIP UNS Surakarta)*

Pojok KR

Ekonom UGM sarankan BBM tidak naik tahun ini.

-- Rasakan denyut kehidupan 'wong cilik'.

***

Rektor Unilam terjaring OTT KPK, cederai misi PT.

-- Tak semua seperti Rektor Unilam.

***

Semangat keberagaman harus terus digelorakan.

-- Yang penting implementasinya.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.